

# KONDISI INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI

*(Manufacturing Industry Condition in Indonesia against Globalization)*

**Sahat Aditua Fandhitya Silalahi\***

\*P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Gedung Nusantara 1 Lantai 2 Setjen DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270  
email: sahatzilalahi81@gmail.com

Naskah diterima: 17 Februari 2014

Naskah direvisi: 14 Maret 2014

Naskah diterbitkan: 25 Juni 2014

## **Abstract**

*Manufacturing industry plays an important role in Indonesian economy mainly due to its ability to produce tradable products and to create jobs. Therefore, policies which are formulated based on manufacturing industry condition becomes paramount, especially in relation to economic globalization. This study uses qualitative approach and the results are presented descriptively. This study concludes that government should pay attention to the three policy issues relating to manufacturing condition of Indonesia. They are technology and infrastructure role in developing manufacturing resistance from economic crisis, manufacturing industry agglomeration which has established the industrial estate, and "missing middle" phenomenon which indicates that there are some problems hindering the manufacturing industry growth organically.*

**Keywords:** *manufacturing, industry, policy, economy*

## **Abstrak**

Industri manufaktur memegang peranan penting di dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berbasis kondisi dalam industri manufaktur menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan globalisasi ekonomi. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian kepada tiga catatan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi manufaktur di Indonesia. Tiga catatan kebijakan tersebut adalah peran teknologi dan infrastruktur dalam membangun ketahanan manufaktur terhadap krisis ekonomi, aglomerasi industri yang telah mendorong terwujudnya kawasan industri, dan fenomena "missing middle" yang mengindikasikan terdapat permasalahan yang menghambat perkembangan industri manufaktur secara organik.

**Kata kunci:** manufaktur, industri, kebijakan, ekonomi

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi ini sudah mulai diorganisasikan secara formal dalam berbagai bentuk perjanjian dagang dan industri, baik secara bilateral, multilateral, ataupun antarregional. Indonesia bersama komunitas regional di Asia Tenggara atau Asia Pasifik serta komunitas internasional lainnya, telah mengambil sikap terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan yang dirumuskan sebagian besar berisi strategi dalam mengembangkan industri dalam negeri beserta antisipasi dampak yang mungkin terjadi.

Dampak globalisasi yang paling dirasakan adalah persaingan yang semakin ketat di berbagai kegiatan ekonomi, terutama di sektor industri. Perubahan ini juga meliputi perubahan perilaku dan orientasi *stakeholders* agar dapat lebih beradaptasi dengan proses industrialisasi yang berkembang. Di sisi

pelaku usaha, perubahan yang terjadi menekankan pada ketahanan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Di sisi lain perubahan lanskap persaingan yang dipicu oleh perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus menghadapi tantangan secara kontinu dalam mewujudkan ketahanan perusahaan. Bagi pemerintah, perubahan yang dinamis dari *stakeholders* di sektor industri, baik yang telah maupun yang akan terjadi, perlu disikapi sebagai tantangan bagi perindustrian nasional.

Berbicara mengenai industri nasional, pemerintah tidak bisa mengabaikan sektor industri manufaktur yang memiliki kontribusi signifikan terhadap keseluruhan industri nasional. Kekuatan dari industri manufaktur terletak dari produk industri itu sendiri yang berupa barang *tradable* (dapat diperdagangkan). Sifat dapat diperdagangkan ini akan mampu menggerakkan rantai nilai dari produsen hingga ke konsumen akhir. Implikasinya adalah semakin banyak lapangan kerja dan dampak ekonomi yang diciptakan oleh industri manufaktur. Selain itu di Indonesia masih banyak terdapat industri manufaktur yang bersifat padat karya, seperti industri garmen

dan alas kaki. Penguatan terhadap industri tersebut menjadi penting dalam menambah lapangan kerja.

Kerangka kebijakan yang dipilih pemerintah tentunya harus berdasar pada kondisi industri manufaktur di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting karena akan membahas kondisi industri manufaktur Indonesia saat ini yang memberikan dasar bagi perumusan kebijakan secara makro. Pemahaman kondisi secara makro akan berimplikasi pada perumusan kebijakan yang tentu saja juga berpengaruh secara mikro, yaitu terhadap keberadaan masing-masing industri manufaktur itu sendiri.

Kerangka penulisan kajian ini dimulai dengan membahas kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selanjutnya membahas gambaran daya saing sektor manufaktur nasional dibandingkan dengan beberapa negara lain di ASEAN; hal ini akan memberikan pemahaman terhadap posisi dan kondisi relatif industri manufaktur Indonesia. Kemudian kajian membahas masalah aglomerasi manufaktur, fenomena yang sudah terjadi di sektor manufaktur Indonesia beserta pengaruhnya terhadap daya saing. Bagian akhir pembahasan fokus pada kinerja sektor industri ditinjau dari aspek produktivitas dan lapangan pekerjaan.

## B. Permasalahan

Sebagaimana dijelaskan di atas, kebijakan pemerintah harus mampu mendorong daya saing industri manufaktur. Pemahaman akan kondisi industri manufaktur di dalam negeri merupakan langkah awal dan memegang peranan vital dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah bagaimanakah kondisi manufaktur di Indonesia, dan apakah kebijakan yang harus diambil pemerintah terkait dengan kondisi tersebut?

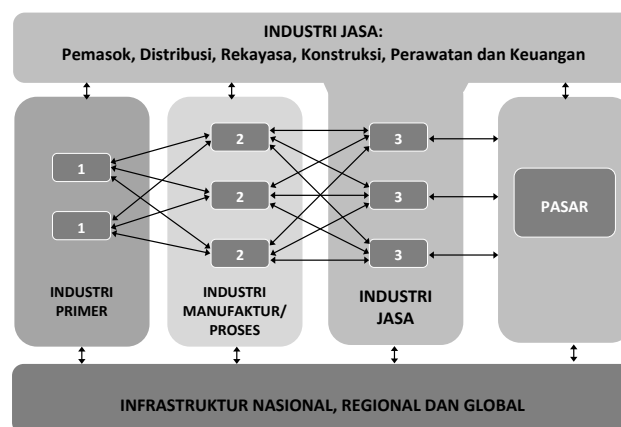
## C. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui kondisi secara makro sektor industri di Indonesia, menganalisis kekuatan dan peluang, serta merekomendasikan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah.

## II. KERANGKA TEORI

Pengembangan industri harus dilakukan secara terintegrasi dalam suatu sistem industri. Sebuah sistem industri mencakup beberapa elemen yang merepresentasikan semua aktivitas atau proses yang diperlukan untuk penciptaan dan penyampaian (*delivery*) produk dan jasa ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Keterkaitan dari keseluruhan aktivitas tersebut juga dikenal sebagai rantai aktivitas

yang membentuk suatu struktur sistem industri seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



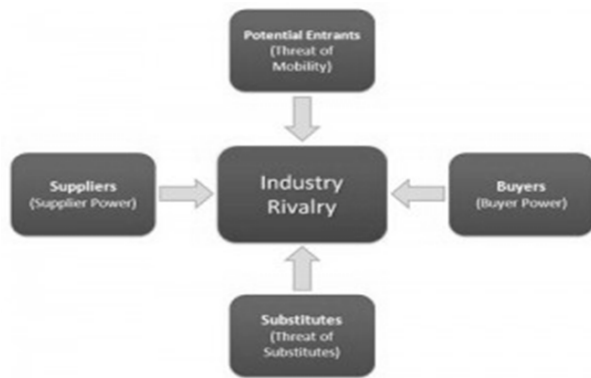
Sumber: Patnaik, 2005.

**Gambar 1.** Rantai Aktivitas dalam Struktur Sistem Industri

Secara umum industri yang terlibat dalam struktur sistem industri dapat dikategorikan sebagai industri penghasil bahan baku dari sumber daya alam (primer), industri manufaktur atau proses (sekunder), dan industri jasa (tersier). Secara umum rangkaian ini juga dikenal sebagai rangkaian industri hulu dan hilir. Dalam perkembangannya, industri jasa tidak hanya berada pada rangkaian terakhir, tetapi juga menjadi penunjang industri primer dan industri manufaktur. Akibatnya, rangkaian aktivitas yang dapat terlibat dalam setiap industri mencakup aktivitas desain produk, rekayasa, manufaktur komponen, perakitan, pemasaran, distribusi, dan pelayanan purna jual.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, dalam mendukung berjalannya sistem industri diperlukan infrastruktur pendukung, baik yang bersifat keras dan *tangible (hard infrastructure)*, maupun yang *intangible (soft infrastructure)*. Dari segi luas wilayah pengaplikasiannya, infrastruktur dapat bersifat nasional, regional, maupun global. Dalam konteks globalisasi, infrastruktur penting yang dibutuhkan oleh industri saat ini adalah infrastruktur standarisasi (dalam kaitannya dengan harmonisasi standar internasional), dan sistem informasi industri yang mencakup operasional industri, pengembangan usaha, dan akses terhadap pasar.

<sup>1</sup> Chris S. Patnaik, *Economics of Regional Development and Planning in Third World Countries*, (New Delhi: Associated Publishing House, 2008).



Sumber: Porter, 2004.

**Gambar 2.** Lima Faktor Kekuatan dalam Kompetisi Industri

Berkaitan dengan peningkatan daya saing industri nasional, hal yang perlu memperoleh perhatian pemerintah adalah lingkungan persaingan industri itu sendiri. Persaingan industri, baik dalam skala nasional maupun global di satu sisi merupakan tantangan bagi perkembangan industri, sedangkan di sisi lain persaingan tersebut merupakan faktor penting yang mendorong kemajuan industri. Teori klasik yang masih relevan digunakan dalam pendekatan persaingan industri adalah teori “lima faktor kekuatan” yang diperkenalkan oleh Porter.<sup>2</sup> Porter menjelaskan bahwa intensitas persaingan dalam suatu sektor industri dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) daya tawar dari pemasok, (2) ancaman dari pemain baru, (3) daya tawar dari pembeli, (4) ancaman dari produk substitusi, dan (5) intensitas persaingan antar pemain dalam satu sektor.<sup>3</sup> Ilustrasi dari ancaman lima faktor ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Lima faktor kekuatan yang berkontribusi dalam kompetisi industri tersebut memberikan implikasi bahwa kondisi internal industri sebuah negara harus dibandingkan dengan kondisi industri negara lain. Dengan kata lain, potret kondisi industri sebuah negara yang dipandang unik, harus disandingkan dengan kondisi industri negara lain yang mungkin lebih ideal dalam aspek kontribusi nasional secara makro.

Dari segi eksekusi, dalam rangka menata perekonomian diperlukan suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkoordinasi dan terkontrol, dan evaluasi yang memadai untuk mengurangi dampak kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Untuk memulainya, maka perencanaan harus dipersiapkan secara komprehensif dengan melibatkan variabel-variabel yang mendukung jalannya roda perekonomian dapat berjalan secara

berkesinambungan. Suatu perencanaan ekonomi dapat didefinisikan secara singkat merupakan kumpulan sasaran ekonomi secara kuantitatif yang dapat dicapai pada suatu kurun waktu tertentu.<sup>4</sup> Definisi lain yang secara spesifik berkaitan dengan pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan perencanaan pemerintah meliputi pengusulan anggaran dan proyeksi evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>5</sup>

Perencanaan pembangunan harus mencakup mengenai arah beserta cara untuk mencapai tujuan pembangunan. Arah pembangunan dan cara pencapaian tujuan dengan kondisi dinamis seperti saat ini akan melibatkan variabel yang semakin kompleks. Perubahan yang cepat mulai terjadi sejak proses industrialisasi di Indonesia. Dengan industrialisasi, sistem produksi, distribusi, dan bahkan konsumsi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pengertian industrialisasi sendiri adalah suatu proses pembangunan kapasitas suatu negara untuk mengolah bahan mentah menjadi barang konsumsi atau sebagai bahan baku untuk tahap produksi selanjutnya.<sup>6</sup>

Perkembangan awal pola industrialisasi di Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan negara industri lainnya, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Taiwan pada saat awal negara-negara ini membangun industrinya. Pola industrialisasi di Indonesia adalah apa yang disebut dengan kapitalisme *ersatz* (semu).<sup>7</sup> Pola ini ditandai oleh 2 hal, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) campur tangan pemerintah terlalu banyak sehingga mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuat kapitalisme menjadi tidak dinamis; dan
- 2) kapitalisme di Indonesia tidak didasarkan pada perkembangan teknologi yang memadai sehingga berakibat pada tidak terjadinya industrialisasi yang mandiri.

Arah proses industrialisasi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Pada umumnya strategi yang dijalankan pemerintah dapat dibedakan menjadi strategi yang bersifat *inward-looking* dan yang bersifat *outward-looking*.<sup>9</sup> Orientasi ekonomi yang

<sup>4</sup> Edward Crals and Vereeck L., “What is National Competitiveness?”, *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 12(2), 2005, pp. 173-184.

<sup>5</sup> Setiana Hanoum dan Partiw S. G., “Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur dengan Pendekatan Kluster Industri dan Manajemen Strategis”, *Jurnal Manajemen dan Pemasaran*, 8(3), 2009, hal. 52-67.

<sup>6</sup> Pviand Sureephong, “Industrialization and Cluster Development,” *Harvard Business Review*, 14(4), 2006, pp. 45-68.

<sup>7</sup> Jonas Ardiantoro, “Industrialisasi: Antara Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”, *Progresif*, 1(3), 2005, pp. 99-117.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Mike J. Benner and Miske Tushman, “Exploitation, Exploration, and Process Management: The Inward and Outward Looking”, *Academy of Management Review*, 28(2), 2006, pp.238-256.

<sup>2</sup> Michael E. Porter, *Competitive Advantage*, 5<sup>th</sup> Edition, (New York: Free Press, 2004).

<sup>3</sup> *Ibid.*

*inward looking* biasanya dicirikan dengan kebijakan yang lebih cenderung memilih untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan mengurangi impor dan berusaha memproduksi barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Di lain pihak, kebijakan *outward looking* bertujuan untuk memacu pertumbuhan dengan orientasi perdagangan ke luar negeri sehingga barang yang dihasilkan lebih berorientasi ekspor.<sup>10</sup>

Baik strategi *inward looking* maupun *outward looking* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Strategi *inward looking* biasanya dipilih dengan alasan tenaga kerja cukup tersedia, untuk memacu perkembangan teknologi, menghindari ketidakstabilan perekonomian dunia, menghemat devisa, atau tersedia pasar dalam negeri yang cukup luas.<sup>11</sup> Untuk menjalankan strategi ini dibutuhkan pengendalian yang cukup ketat dari pemerintah. Dalam menjalankan strategi *inward looking* pemerintah dapat juga mengambil kebijakan perlindungan produk dalam negeri, baik melalui penetapan tarif impor yang tinggi maupun penetapan kuota barang masuk. Hal ini memberikan implikasi bahwa pemerintah harus benar-benar yakin bahwa kebutuhan atas barang tersebut dapat dipenuhi dari produk dalam negeri.

Risiko yang dapat terjadi dari strategi *inward looking* adalah ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi dalam hal ini dapat terjadi karena barang dari luar negeri tidak bisa masuk pasar dalam negeri karena harga terlalu mahal akibat kebijakan tarif tinggi. Dalam kondisi ini, terdapat risiko produsen menaikkan harga barang sehingga harga barang di pasar dalam negeri menjadi lebih tinggi dibandingkan harga di pasar internasional.<sup>12</sup> Selain itu, karena lebih terlindung dari persaingan dengan produsen luar negeri, maka produsen dalam negeri cenderung tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas barangnya. Pada akhirnya pihak yang paling dirugikan adalah konsumen, karena mereka memperoleh barang dengan harga yang lebih tinggi dengan kualitas yang tidak lebih baik dibandingkan kualitas barang yang sama di pasar internasional.

Selain risiko yang dihadapi oleh konsumen, secara makro, perekonomian negara juga akan dirugikan. Risiko secara makro akan dihadapi oleh negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor industri. Inefisiensi secara makro akan terjadi karena kecenderungan kualitas dan harga barang tidak akan pernah sebanding akibat proteksi oleh pemerintah. Kenyataan bahwa perkembangan

teknologi telah menjadi pendorong utama ekonomi juga memperburuk kondisi negara. Karena memperoleh proteksi, maka produsen cenderung tidak berinvestasi untuk mengembangkan teknologi sehingga ketergantungan kepada teknologi luar semakin tinggi. Sebagai akibatnya adalah, walaupun barang konsumsi tetap bisa dipenuhi dari dalam negeri, akan tetapi barang modal tetap harus diimpor dari luar negeri.<sup>13</sup>

Untuk mengantisipasi supaya hal-hal sebelumnya tidak terjadi atau paling tidak meminimumkan akibat negatif yang mungkin muncul, penjabaran rencana implementasi strategi yang lebih mendalam mutlak dilakukan. Penting juga untuk ditentukan jenis industri apa yang akan dijadikan acuan. Walaupun potensi permintaan di dalam negeri cukup luas, tetapi masih ada faktor yang lebih menentukan, yaitu jenis dan jumlah barang, teknologi yang digunakan untuk memproduksi, sasaran pasar, dan strategi harga yang sesuai.<sup>14</sup> Untuk mendukung arah strategi ini perlu disiapkan para pelakunya agar lebih siap dan jenis industri yang cocok dengan kondisi atau konteks yang ada. Tenaga kerja juga perlu diperhatikan tingkat kesiapannya, sehingga biaya untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan teknologi yang tersedia tidak terlalu tinggi.<sup>15</sup>

Sementara itu strategi *outward looking* sangat dipengaruhi kondisi perekonomian internasional. Strategi ini cukup menguntungkan pada saat kondisi perekonomian internasional sedang bagus dan stabil. Akan tetapi bila kondisi perekonomian internasional sedang turun maka industri dalam negeri juga sangat berisiko untuk masuk ke dalam krisis. Untuk mengantisipasi hal ini maka pemerintah mau tidak mau harus berinvestasi di dalam pengembangan teknologi rekayasa yang mampu menjaga daya saing dari produk dalam negeri dalam kondisi krisis perekonomian global.<sup>16</sup> Selepas dari krisis, strategi pengembangan teknologi ini juga tetap harus berlanjut agar daya saing produk dalam negeri tetap dapat bersaing di pasar internasional.

Dengan strategi *outward looking*, globalisasi merupakan faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi dan dapat berakibat pada perubahan

<sup>10</sup> Jonas Ardiantoro, *Op.Cit.*

<sup>11</sup> Chris J. Narver and Simone F. Slater, "The Effect of Market Orientation on Industrial Policy", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 17(1), 2007, pp. 44-52.

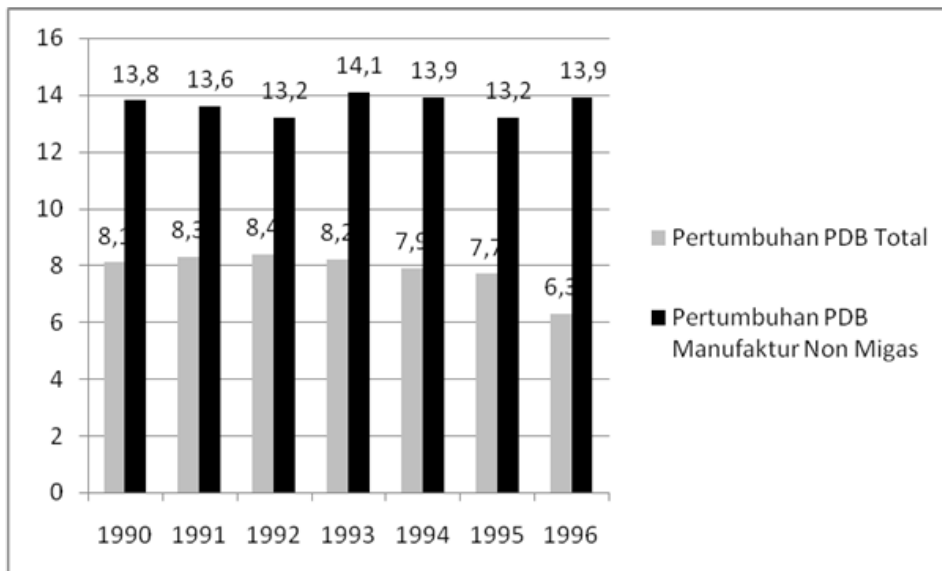
<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Simone F. Slater, "Industrial Policy in Emerging Market: Study towards Unexpected Growth in Jamaica", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 17(3), 2007, pp. 211-226.

<sup>14</sup> Michael H. A., R. D. Ireland, and R. E. Hoskisson, *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).

<sup>15</sup> Slater, *Op.Cit.*

<sup>16</sup> G. D. Karagiannopoulos, N. Georgopoulos, and K. Nikolopoulos, "Fathoming Porter's Five Forces Model in The Internet Era", *The Journal of Policy, Regulation, and Strategy for Telecommunications*, 7(1), 2005, pp. 354-386.



Sumber: World Bank, 2012.

**Gambar 3.** Pertumbuhan PDB Manufaktur Non Migas dan PDB Total Sebelum Krisis (dalam persen)

struktur sosial ekonomi dunia.<sup>17</sup> Yang perlu memperoleh perhatian di sini adalah perkembangan globalisasi lebih dimaknai dalam konteks globalisasi ekonomi. Perubahan yang paling penting dalam konteks industri adalah terbukanya pasar dunia dibarengi oleh terintegrasinya sistem keuangan internasional, sehingga aliran barang dan aliran pembayaran dapat berlangsung secara simultan dan *real time*.

### III. METODOLOGI

Kajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Kajian ini dilakukan dengan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat kajian dilakukan serta menampilkan sesuai temuan yang sebenarnya. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, bersumber dari literatur, jurnal, surat kabar, maupun dokumen resmi. Adapun data yang diperlukan antara lain adalah kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional, daya saing sektor manufaktur Indonesia terhadap negara ASEAN, dan kondisi manufaktur Indonesia saat ini berdasarkan jumlah tenaga kerja dan omset.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kontribusi Sektor Manufaktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto

Dari tahun 1990 hingga tahun 1996, pertumbuhan sektor manufaktur non migas Indonesia mencapai 12 persen per tahun<sup>18</sup> dan menyumbang sepertiga

dari seluruh pertumbuhan PDB. Kinerja yang bagus sepanjang periode ini telah mempercepat transformasi Indonesia dari perekonomian agraris menjadi semi industrialis. Akan tetapi setelah periode *booming* manufaktur tersebut, Indonesia masuk ke dalam krisis ekonomi dan politik yang membawa dampak resesi pertumbuhan sektor manufaktur dan memberikan kontribusi yang jauh lebih sedikit terhadap pertumbuhan PDB.<sup>19</sup> Pertumbuhan PDB manufaktur non migas dan pertumbuhan PDB total saat sebelum krisis dan pasca krisis dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Pada Gambar 3 dan Gambar 4 terlihat bahwa terjadi penurunan tingkat pertumbuhan sektor manufaktur khususnya manufaktur non migas sebelum dan setelah krisis ekonomi tahun 1997-1998. Sebelum periode krisis, pertumbuhan PDB sektor manufaktur nonmigas berkisar 13-14 persen per tahun, bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB total yang hanya berkisar 6-8 persen per tahun. Setelah periode krisis, pertumbuhan PDB sektor non migas turun di kisaran 3-5 persen, dan selalu berada di bawah angka pertumbuhan PDB total. Hal ini memperlihatkan bahwa krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor manufaktur non migas. Dampak yang paling signifikan berasal dari pengurangan tenaga kerja dan pengurangan belanja modal yang sebagian besar masih harus diimpor.<sup>20</sup>

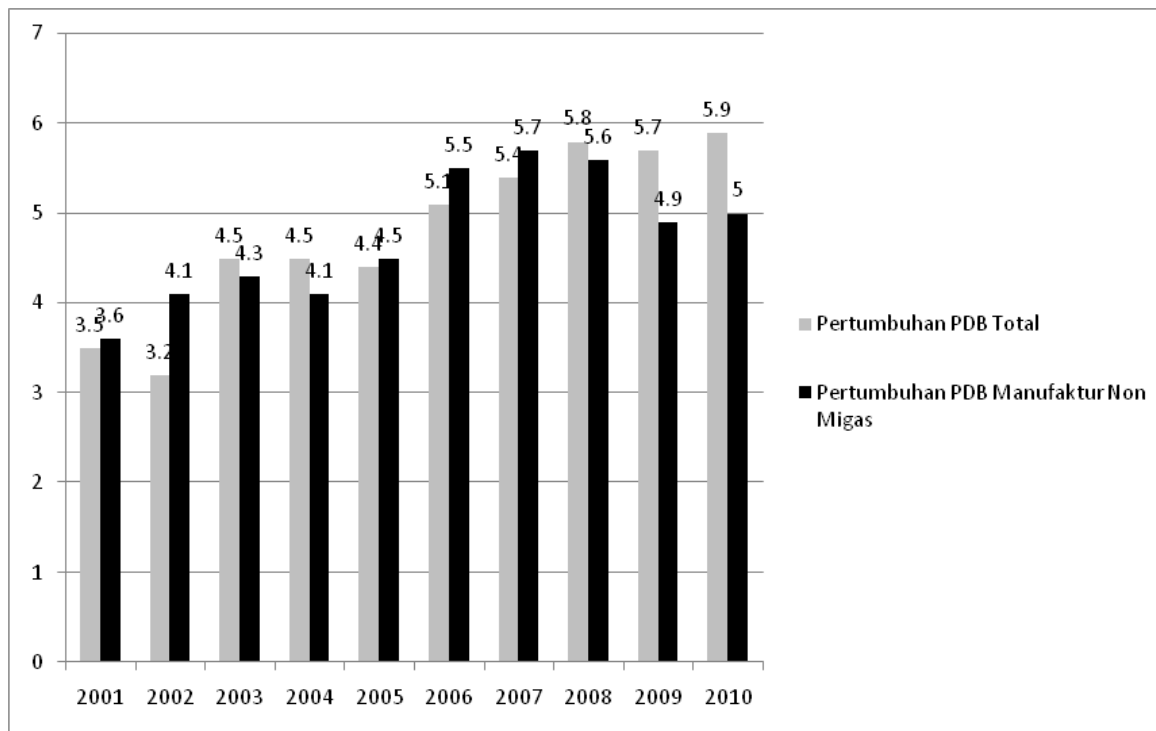
Sementara itu di sisi permintaan, krisis ekonomi juga telah mengurangi belanja konsumen untuk produk di sektor ini karena pengalihan alokasi belanja

<sup>17</sup> Sampurno, *Manajemen Strategik: Menciptakan Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

<sup>18</sup> Abdullah Basyir, "Perumusan Strategi bagi Kluster Industri Komponen Otomotif Menggunakan Pendekatan Strategic Management untuk Meningkatkan Daya Saing", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Gadjah Mada*, 5(1), 2009, hal. 214-226.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Country Report No. 73128, *Mempercepat Laju Pertumbuhan di Sektor Manufaktur Indonesia*, *World Bank*, 2012.



Sumber: World Bank, 2012.

**Gambar 4.** Pertumbuhan PDB Manufaktur Non Migas dan PDB Total Pasca Krisis (dalam persen)

untuk barang-barang yang lebih bersifat kebutuhan pokok.<sup>21</sup> Berkurangnya jumlah permintaan atas produk manufaktur non migas juga terjadi pada pasar luar negeri, sehingga mendorong pergeseran jenis ekspor dari Indonesia. Tercatat pada tahun 1995 ekspor produk berbasis sumber daya alam sebesar 34 persen. Angka ini melonjak menjadi 47 persen pada tahun 2010.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa produsen dalam negeri beralih orientasi ekspor kepada produk primer yang tidak membutuhkan proses lebih untuk meningkatkan nilai tambah. Produsen dalam negeri berusaha untuk mengurangi biaya produksi, walaupun di sisi lain terdapat kehilangan kesempatan untuk menjual produk pada harga yang lebih tinggi.

Pemulihan sektor manufaktur Indonesia kembali menghadapi tantangan yang berasal dari krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa pada periode tahun 2007-2011. Akan tetapi kebijakan pemerintah yang memberikan keberpihakan pada sektor manufaktur dalam negeri melalui berbagai perangkat perundang-undangan telah memberikan hasil yang cukup jelas. Salah satu indikatornya adalah kenaikan produksi perusahaan manufaktur berskala menengah dan besar yang mencapai 5,6 persen per

tahun.<sup>23</sup> Pertumbuhan nilai tambah riil terjadi relatif luas di mana pendorong utamanya adalah mesin dan suku cadang otomotif dengan kenaikan yang sangat pesat sebesar 29,8 persen per tahun.<sup>24</sup>

Sebagian peningkatan output manufaktur Indonesia baru-baru ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan arus investasi langsung asing. Pada awal krisis keuangan di Amerika Serikat arus masuk investasi langsung ke Indonesia turun hampir separuh dari USD9,3 miliar pada tahun 2008 menjadi USD4,9 miliar pada tahun 2009. Kenaikan yang signifikan terjadi setelah pemulihan perekonomian di mana angka investasi langsung asing dua kali lipat, yaitu USD18,9 miliar pada tahun 2011.<sup>25</sup> Daya tarik sebagai lokasi produksi berbiaya rendah sekaligus memiliki pasar domestik yang berkembang pesat menjadi salah satu alasan investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

Kekuatan sektor manufaktur terletak kepada jenis output yang bisa diperdagangkan (*tradable*).<sup>26</sup> Dalam konteks perdagangan internasional, sifat output sektor manufaktur yang *tradable* mampu

<sup>21</sup> Haryanto Dwi dan Ardiyanto Agung, "Krisis Moneter 1998 dan Kesempatan Re-Industrialisasi Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UGM Yogyakarta*, 4 (2), 2006, hal. 524-555.

<sup>22</sup> Retno Andariningsih, "Kebijakan Pembatasan Ekspor Bahan Mentah dan Produk Primer Indonesia: Antara Kepentingan Publik dan Motif Keuntungan Investasi", *Jurnal Pembangunan Regional FE UII*, XI, hal. 33-67.

<sup>23</sup> Country Report No. 73128, *Op.Cit.*

<sup>24</sup> Sugeng Irianto, "Manajemen Sektor Otomotif Dalam Kaitannya dengan Konsep Rantai Pasokan Terpusat", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Gadjah Mada*, 5, 2012, hal. 180-197.

<sup>25</sup> Country Report No. 73128, *Op.Cit.*

<sup>26</sup> Rina Amalia, "Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan Industri Berbasis Agro Lintas Kabupaten di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Studi Pembangunan Universitas Surabaya*, 1(3), 2009, hal. 276-290.

memberikan *economic spillovers* dalam skala yang luas.<sup>27</sup> Keterkaitan dengan sektor lain berasal dari sisi internal maupun eksternal produksi. Sisi internal produksi berkaitan dengan rantai nilai produksi dari pemrosesan bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Sedangkan sisi eksternal berkaitan dengan rantai nilai yang terbentuk dari proses distribusi dan penjualan hingga mencapai konsumen akhir.

Momentum positif sektor manufaktur Indonesia memberikan manfaat bagi pertumbuhan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Hal ini merupakan catatan bagi pembuat kebijakan bahwa kinerja sektor manufaktur berbanding lurus dengan penciptaan lapangan pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas, memfasilitasi transformasi struktural yang positif, meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik di sektor manufaktur itu sendiri maupun pada sektor-sektor lain yang berkaitan, dan memberikan kesempatan untuk mengatasi kesenjangan gender.<sup>28</sup>

## B. Gambaran Daya Saing Sektor Manufaktur Indonesia

Terdapat tiga subsektor manufaktur yang dapat membantu menggambarkan apa yang telah terjadi pada daya saing ekspor industri Indonesia. Ketiga subsektor tersebut adalah furnitur, pakaian jadi, dan otomotif.<sup>29</sup> Dua subsektor yang pertama bersifat padat karya dan telah menjadi tradisi di Indonesia, sedangkan subsektor ketiga merupakan contoh yang baik dari sektor manufaktur yang tengah muncul dan akan menjadi tulang punggung perekonomian di masa yang akan datang.

Sejak krisis moneter tahun 1998, subsektor furnitur dan pakaian jadi mengalami penurunan kualitas produk yang dijual di pasar ekspor. Pengusaha furnitur dan pakaian jadi menghadapi kenaikan harga terutama harga bahan pembantu. Selain itu banyak terjadi pengurangan tenaga kerja terampil sehingga berdampak kepada menurunnya kualitas. Penurunan kualitas ini membawa pergeseran segmen pasar sehingga produk furnitur dan pakaian jadi terjebak di antara perusahaan asing yang bergerak di segmen produk murah dan segmen produk mahal dan berkualitas tinggi.<sup>30</sup>

Melihat satu dekade terakhir subsektor pakaian jadi telah mengalami pertumbuhan ekspor di pasar yang penting seperti di Amerika. Namun setelah terjadi krisis Asia, lebih sedikit produsen pakaian jadi Indonesia yang berhasil masuk ke pasar ekspor, sedangkan dari yang berhasil masuk ke pasar ekspor, hanya sedikit yang mampu bertahan.<sup>31</sup> Akibatnya ekspor semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar besar yang jumlahnya hanya sedikit. Sebaliknya di subsektor furnitur, jumlah perusahaan yang masuk ke pasar ekspor naik relatif lebih cepat ke tingkat sebelum terjadinya krisis, tetapi output setiap perusahaan cenderung menurun dan tidak pernah pulih ke tingkat semula. Fenomena ini juga diikuti oleh menurunnya persentase penjualan di semua segmen pasar, sebagaimana pada Gambar 5 dan Gambar 6, di mana tahun 1990-1996 mewakili periode sebelum krisis, tahun 1996-2000 mewakili periode saat krisis, dan tahun 2000-2008 mewakili periode setelah krisis.

Subsektor otomotif jauh lebih dinamis dengan peningkatan nilai ekspor yang dramatis dalam dua dekade terakhir. Pada awalnya nilai ekspor produk otomotif tahun 1996 hanya sekitar 1/6 dari ekspor furnitur dan 1/16 dari ekspor pakaian. Akan tetapi pada tahun 2008 nilai ekspor dari produk otomotif mencapai sekitar tiga kali dari nilai ekspor furnitur dan dua kali dari nilai ekspor pakaian.<sup>32</sup> Di subsektor otomotif, skala produksi merupakan penentu daya saing karena terdapat penghematan biaya produksi yang signifikan. Selain itu pengaruh faktor skala produksi semakin signifikan ketika telah terintegrasi dengan rantai nilai global terutama distribusi. Semakin luas jaringan distribusi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan otomotif maka kecenderungan penjualan akan semakin meningkat dan penghematan dari biaya distribusi akan semakin tinggi.

Dari perbandingan ketiga subsektor pakaian, furnitur, dan otomotif dapat diambil simpulan bahwa kunci utama bertahan dari krisis adalah keberadaan keunggulan kompetitif yang seringkali melibatkan faktor teknologi (dalam hal ini subsektor otomotif melibatkan teknologi yang lebih canggih bila dibandingkan dengan subsektor pakaian jadi dan furnitur). Kecanggihan teknologi seringkali berbanding lurus dengan rantai nilai yang diperlukan untuk menjual produk kepada konsumen akhir. Hal ini dikarenakan semakin banyak pihak yang terlibat dalam mengelola distribusi dan penjualan produk dengan teknologi tinggi.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan lingkungan eksternal, lingkungan ekonomi makro di mana sektor manufaktur Indonesia

<sup>27</sup> Kevin Robert and Ivan Hubbert, "International Entropy: A Trade off Between Supplier and Principal Ownership", *Journal of International Trade*, III, 2007, pp. 45-60.

<sup>28</sup> K. Juliana, Davis M., and Ullly H., "Dimension in Manufacturing: Practices in India and Bangladesh", *Journal of Urban Studies*, 22(1), 2009, pp. 413-444.

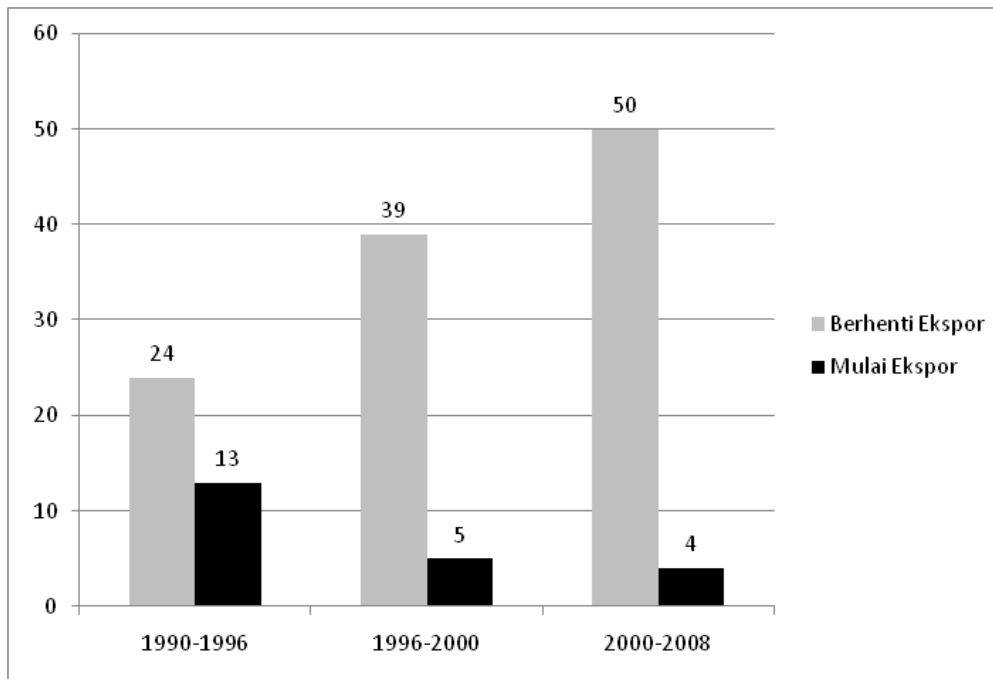
<sup>29</sup> Utary Iryani, "Masa Depan Sektor Manufaktur di Indonesia di Antara Peningkatan Nilai Tambah dan Peningkatan Ekspor", *Jurnal Kajian Bappenas*, 5(1), 2011, hal. 17-45.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Industri Otomotif Nasional 1990-2011*, (Jakarta: BPS, 2013).

<sup>33</sup> Hamman and Kross Elisabeth, "Conflict Resolution in Distribution Channel: A Case Study on High Involvement and Low Involvement Products", *Journal on Distribution*, 11(9), 2007, pp. 45-60.



Sumber: Iryani, 2011.

**Gambar 5.** Persentase Eksportir Pakaian Jadi yang Berhenti Ekspor dan Mulai Ekspor

beroperasi juga mengalami perubahan setelah krisis Asia. Salah satu indikator yang mudah diamati adalah tingkat perolehan (*rate of return*) menurun meskipun resiko dari usaha semakin meningkat di banyak negara Asia.<sup>34</sup> Dampak ini lebih terasa di Indonesia di mana sebagian besar sektor manufaktur yang beroperasi masih bersifat padat karya. Tingkat perolehan sektor manufaktur di beberapa negara ASEAN sebelum dan setelah krisis dapat dilihat pada Gambar 7.

Dari segi biaya, minimnya kapasitas infrastruktur yang disertai dengan kenaikan tingkat upah memberikan dampak kepada harga input manufaktur. Permasalahan yang dihadapi pengusaha adalah tingkat kenaikan harga input lebih cepat terjadi daripada tingkat kenaikan harga output. Walaupun pada akhirnya harga output tersebut juga naik untuk mengimbangi harga input, akan tetapi level harga yang terbentuk tidak akan sama dengan harga input.<sup>35</sup> Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti daya beli konsumen dan tingkat persaingan yang memaksa pengusaha memangkas margin keuntungan yang mereka peroleh. Sedangkan di pasar internasional, tingkat persaingan antareksportir yang mengalami peningkatan di awal tahun 2000 telah mengurangi margin keuntungan sehingga berada di bawah margin keuntungan perusahaan non eksportir.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Pranoto Hargo, "Analisis Daya Saing Negara ASEAN terhadap Sektor Padat Karya", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UGM*, 3(2), 2008, hal. 33-55.

<sup>35</sup> *Ibid.*

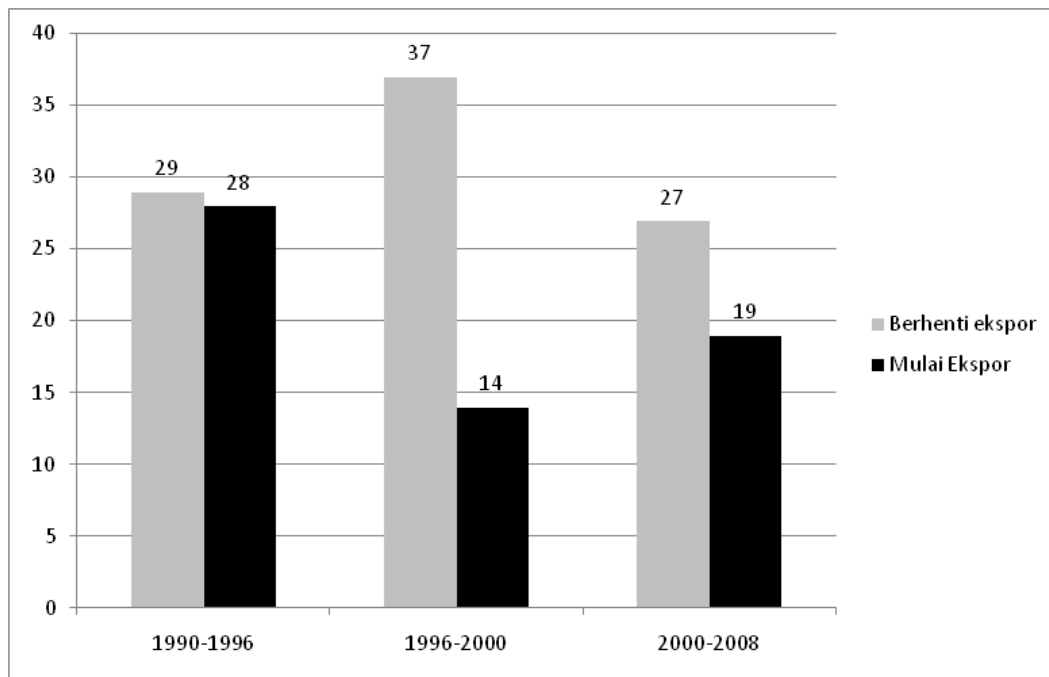
<sup>36</sup> P. Athanoglou and Bardaka, "New Trade Theory: Non Price Competitiveness and Export Performance", *Journal of Economic Modeling*, 27, 2010, pp. 217-228.

Catatan kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah sebagai akhir dari bagian ini adalah penggunaan teknologi sangat penting bagi perkembangan sektor manufaktur. Pemerintah juga harus memperhatikan kualitas infrastruktur sehingga biaya perusahaan dapat lebih terkendali.

### C. Aglomerasi Manufaktur dan Pengaruhnya terhadap Daya Saing

Aglomerasi telah terjadi pada sektor manufaktur di Indonesia. Pada saat ini kegiatan-kegiatan manufaktur tampak terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Proses ini berlangsung secara berulang karena perusahaan baru cenderung memilih lokasi dengan kepadatan kegiatan manufaktur lainnya yang juga tinggi. Selain itu penentuan pemilihan lokasi cenderung dipengaruhi oleh jenis keterampilan tenaga kerja tertentu dengan biaya yang wajar, ketersediaan infrastruktur, dan kedekatan dengan pasar input maupun output serta dampak limbah ekspor dan penanaman modal asing secara langsung.

Salah satu penelitian menyatakan bahwa pola aglomerasi juga telah terbentuk di luar kawasan manufaktur yang lama. Pembentukan aglomerasi banyak dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Pada saat biaya kongesti (biaya tambahan di luar perencanaan yang menghambat operasional perusahaan) mengurangi daya tarik aglomerasi di lokasi yang lama, maka perusahaan akan mencari lokasi lain, dan dimulailah proses pembentukan kawasan manufaktur baru. Contoh biaya kongesti yang paling



Sumber: Iryani, 2011.

**Gambar 6.** Persentase Eksportir Furnitur yang Berhenti Ekspor dan Mulai Ekspor

signifikan dalam sebuah perusahaan antara lain adalah biaya buruh, perizinan, dan biaya yang timbul akibat permasalahan infrastruktur.<sup>37</sup> Sebagai contoh adalah tuntutan upah buruh yang selalu naik setiap tahun mendorong kegiatan manufaktur ke kawasan non tradisional yang baru. Untuk kasus di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang memilih kawasan non tradisional untuk beroperasi adalah perusahaan-perusahaan manufaktur ringan dan perusahaan-perusahaan dengan skala hasil yang lebih rendah.

Salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam pembangunan kawasan aglomerasi adalah keterkaitan dengan produktivitas yang lebih tinggi. Bukti di Indonesia memperlihatkan bahwa selama periode tahun 1993-2009 perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan aglomerasi utama memiliki tingkat produktivitas rata-rata 30 persen lebih tinggi daripada perusahaan di luar kawasan aglomerasi.<sup>38</sup> Hal ini terkait keunggulan yang diperoleh sebuah perusahaan yang beroperasi di kawasan aglomerasi antara lain keberadaan infrastruktur yang lebih terintegrasi, keberadaan fasilitas produksi, dan fasilitas pengolahan limbah terpadu yang dapat meminimalkan biaya produksi.

Aglomerasi industri di Indonesia juga berkaitan erat dengan keragaman kegiatan industri, baik dari jenis maupun produk. Artinya setiap produk dalam satu kawasan industri cenderung memiliki tingkat diversifikasi yang lebih luas dibandingkan

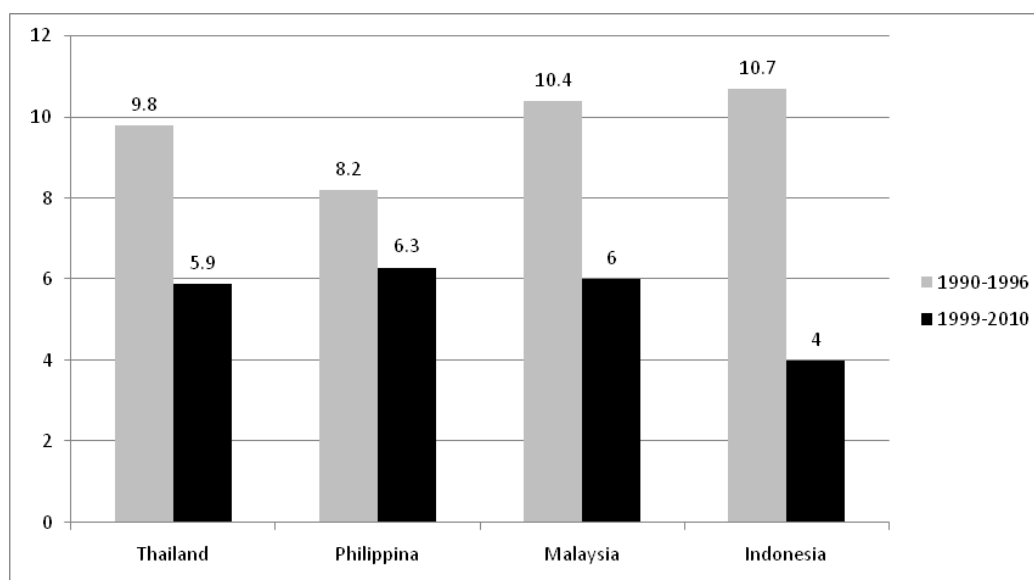
dengan jenis produk yang berasal dari industri di luar kawasan aglomerasi. Produktivitas di kawasan aglomerasi ternyata memberikan dampak positif terhadap perkembangan jenis usaha dan produk dari industri. Tingginya produktivitas secara positif mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan dan pada akhirnya mendorong usaha diversifikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang potensial.

Dalam kaitannya dengan pembentukan aglomerasi manufaktur, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mendorong pembentukan aglomerasi tersebut. Kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi merupakan hal yang relevan bagi perusahaan manufaktur yang beroperasi di daerah tersebut dan berperan penting dalam menentukan lokasi. Sebuah kabupaten/kota yang memiliki sistem perizinan usaha yang mudah cenderung menarik lebih banyak perusahaan baru. Selain itu perusahaan juga menaruh perhatian tentang transparansi dan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, utamanya tingkat upah yang berlaku.

Catatan kebijakan pemerintah sebagai akhir bagian ini adalah, aglomerasi merupakan peristiwa alami yang terjadi di sektor industri, khususnya manufaktur. Aglomerasi ini harus dapat difasilitasi pemerintah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus terpadu di mana seluruh kegiatan industri manufaktur dapat beroperasi dan terintegrasi dengan industri lainnya.

<sup>37</sup> Sou Kim, J Koo, and Lee, Y. K., "Infrastructure and Production Efficiency: An Analysis on The Korean Manufacturing Industry", *Contemporary Economic Policy*, 17(3), 2009, pp. 390-400.

<sup>38</sup> *Ibid.*



Sumber: Hargo. 2008.

**Gambar 7.** Tingkat Perolehan Sektor Manufaktur di Beberapa Negara ASEAN Sebelum Krisis (Tahun 1990-1996) dan Setelah Krisis (Tahun 1999-2010) (dalam Persen)

#### D. Kinerja Sektor Industri Ditinjau dari Aspek Produktivitas dan Lapangan Pekerjaan

Kondisi industri manufaktur berikutnya yang perlu memperoleh perhatian pemerintah adalah peningkatan produktivitas dialami subsektor yang memproduksi barang elektronik, mesin dan peralatan, tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. Sedangkan di sisi lain, subsektor sumber daya alam di mana margin keuntungan yang diperoleh lebih tinggi, ternyata mencatat angka produktivitas yang lebih rendah.<sup>39</sup>

Hal lain yang perlu memperoleh perhatian adalah perusahaan-perusahaan yang terintegrasi dengan perekonomian global ternyata mampu memperlihatkan pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat. Perusahaan yang lebih terintegrasi dengan perekonomian global, baik karena perusahaan tersebut mengekspor sebagian besar produk mereka, atau mengimpor bahan baku akan menunjukkan pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat. Hal yang sama dapat terjadi pada perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan multinasional, karena terdapat integrasi vertikal yang memungkinkan produk untuk diekspor dengan mengamankan bahan baku dari pasar impor.

Sementara itu, kecenderungan perusahaan yang terintegrasi secara global untuk bertumbuh lebih cepat dalam hal produktivitas mengakibatkan fenomena 10 persen perusahaan teratas ternyata lima kali lebih produktif dibandingkan 10 persen perusahaan terbawah. Hal ini mengimplikasikan bahwa produktivitas keseluruhan dalam perekonomian Indonesia dapat meningkat secara signifikan apabila sumber daya mengalir lebih bebas dan lebih cepat dari

<sup>39</sup> Kevin Robert and Ivan Hubbert, "International Entropy: A Trade off Between Supplier and Principal Ownership", *Journal of International Trade*, Vol. III, 2007, pp. 45-60.

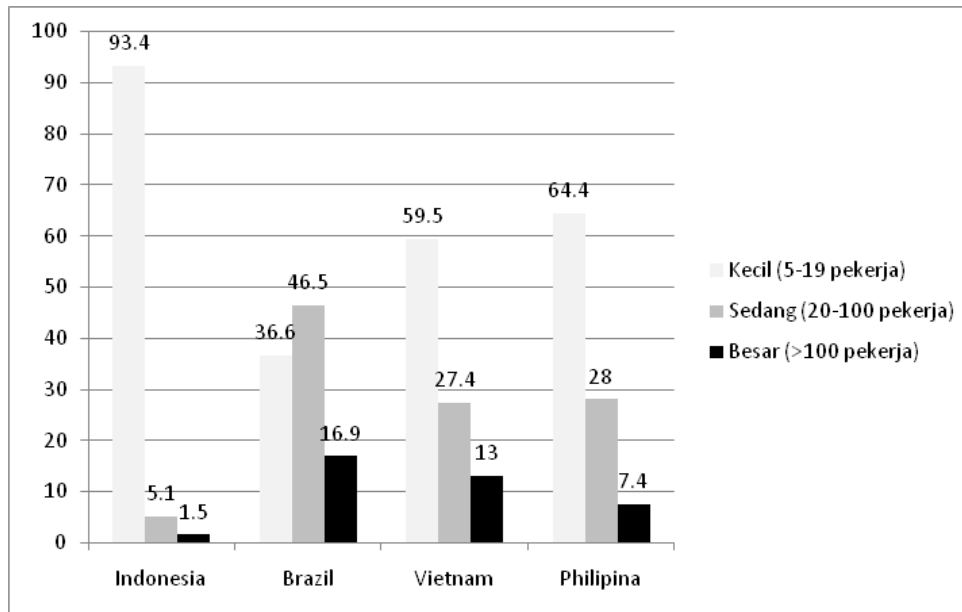
perusahaan yang kurang efisien kepada perusahaan yang lebih efisien.<sup>40</sup>

Peningkatan produktivitas secara keseluruhan juga berimplikasi pada produktivitas perusahaan. Hal ini disadari oleh pihak manajemen dan membuat perusahaan berusaha untuk merekrut sumber daya terbaik dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan. Akibatnya adalah terjadi perpindahan sumber daya dari perusahaan kecil kepada perusahaan besar yang mampu memberikan tingkat produktivitas lebih tinggi.

Fenomena perpindahan sumber daya tersebut mengakibatkan fenomena "missing middle" di perusahaan manufaktur sebagaimana disampaikan dalam laporan penelitian *World Bank* tahun 2009. Di dalam laporannya, terungkap bahwa perusahaan manufaktur menengah di Indonesia hanya sebesar 5,1 persen dari total keseluruhan manufaktur. Sementara itu perusahaan manufaktur kecil berkontribusi sebesar 93,4 persen. Fenomena yang teramat jauh berbeda dibandingkan beberapa negara manufaktur berkembang, seperti Brazil dan Vietnam. Di negara tersebut terdapat persebaran yang seimbang antara manufaktur kecil, menengah, dan besar. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan manufaktur yang bertahap dari manufaktur kecil, menengah, dan besar. Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi perusahaan manufaktur menurut skala usahanya dapat dilihat pada Gambar 8.

Beberapa faktor yang membatasi pertumbuhan kapasitas perusahaan manufaktur skala kecil di Indonesia. Penyebab utama adalah ketidakmampuan dari perluasan pasar sehingga mereka tidak memperoleh

<sup>40</sup> Country Report No. 73128, *Op.Cit.*



Sumber: World Bank, 2009.

**Gambar 8.** Persentase Perusahaan Manufaktur Kecil, Menengah, dan Besar di Indonesia, Brazil, Vietnam, dan Philipina Tahun 2008

keuntungan dari skala ekonomis. Hal ini dapat dibuktikan dengan struktur perusahaan kecil di Indonesia yang tidak proporsional menurut standar internasional, seperti jumlah karyawan dan jumlah omset per bulan.<sup>41</sup>

Catatan kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah dari bagian ini adalah adanya kesenjangan produktivitas dari industri manufaktur kecil dan industri manufaktur besar. Hilangnya bagian industri manufaktur kelas menengah menunjukkan terdapat hambatan bagi industri manufaktur kecil untuk berkembang secara organik menjadi industri manufaktur menengah. Hambatan ini mengakibatkan sumber daya yang dimiliki industri manufaktur kecil berpindah kepada industri manufaktur besar karena hal ini akan lebih efisien dan mendatangkan keuntungan daripada tetap berada pada industri manufaktur kecil.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, catatan kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi dari industri manufaktur di Indonesia adalah (1) keberadaan teknologi dan infrastruktur merupakan penunjang daya saing di sepanjang rantai nilai baik secara nasional maupun internasional, (2) aglomerasi merupakan fenomena alami dalam industri manufaktur, sehingga pemerintah harus mengakomodasi dan memfasilitasi aglomerasi tersebut dengan pengadaan Kawasan Ekonomi Khusus, dan (3) terdapat kesenjangan

produktivitas antara industri manufaktur kecil dan industri manufaktur besar.

### B. Saran

Berkaitan dengan keberadaan teknologi, inovasi merupakan kata kunci Industri manufaktur dalam menciptakan teknologi yang mampu mengadaptasi proses bisnis sekaligus mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Rasionalisasi pajak atau insentif bagi perusahaan manufaktur yang menerapkan teknologi dalam proses bisnisnya adalah pilihan kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah. Pada prinsipnya kebijakan pada industri manufaktur harus dilekatkan dalam upaya inovasi dan penggunaan teknologi.

Berkaitan dengan infrastruktur dan aglomerasi, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap biaya logistik dan biaya operasional untuk meningkatkan margin keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan manufaktur dan memperkuat proses aglomerasi. Konektivitas yang lebih baik memungkinkan perusahaan manufaktur meningkatkan efisiensi operasional.

Untuk jangka menengah dan panjang, kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah mengatasi "missing middle" dengan memangkas berbagai biaya yang menghambat perusahaan manufaktur kecil menjadi perusahaan manufaktur menengah. Berbagai biaya birokrasi dan perizinan harus dipangkas seiring dengan penguatan perlindungan terhadap keberadaan industri manufaktur kecil dan menengah. Memperkuat perlindungan bagi kreditor dan memfasilitasi biro-biro kredit swasta dapat membantu sektor perbankan untuk memberikan

<sup>41</sup> Herdianti Diana Atmanti, "Analisis Efisiensi dan Keunggulan Kompetitif Sektor Industri Manufaktur di Jawa Tengah Sebelum dan Selama Krisis", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 1(1), 2004, hal. 1-16.

lebih banyak pinjaman kepada perusahaan domestik, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Akan tetapi perlindungan ini juga perlu disertai dengan pengembangan lebih lanjut pasar obligasi, pasar asuransi, dan dana pensiun di Indonesia dalam rangka menurunkan biaya pinjaman.

Berkaitan dengan perizinan, pemerintah selayaknya memberikan perhatian kepada kemudahan untuk membangun usaha, juga kemudahan untuk mengakhiri usaha. Menyederhanakan perizinan usaha untuk membuka dan menutup usaha dapat mengatasi situasi “*missing middle*”. Selain itu pemerintah harus memastikan peraturan ketenagakerjaan cukup fleksibel untuk memberikan ruang bagi perusahaan agar tumbuh menjadi lebih besar tanpa perlu takut terbebani biaya untuk gaji pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hitt, M. A., Ireland, R. D., and Hosskisson, R. E. *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Patnaik, S. C. *Economics of Regional Development and Planning in Third World Countries*. New Delhi: Associated Publishing House, 2008.
- Porter, M. E. *Competitive Advantage*, 5<sup>th</sup> Ed. New York: Free Press, 2004.
- Sampurno. *Manajemen Stratejik: Menciptakan Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

### Jurnal

- Amalia, R. “Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan Industri Berbasis Agro Lintas Kabupaten di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Studi Pembangunan Universitas Surabaya*, 1(3), 2009, pp. 276-290.
- Andaringsih, R. “Kebijakan Pembatasan Ekspor Bahan Mentah dan Produk Primer Indonesia: Antara Kepentingan Publik dan Motif Keuntungan Investasi”. *Jurnal Pembangunan Regional FE UII*, Vol XI, 2012, hal. 33-67.
- Ardiantoro, J. “Industrialisasi: Antara Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”. *Progresif*, 1(3), 2005, pp. 99-117.
- Athanasoglou, P. and Bardaka. “New Trade Theory: Non Price Competitiveness and Export Performance”. *Journal of Economic Modeling*, Vol. 27, 2010, pp. 217-228.

- Atmanti, H. D. “Analisis Efisiensi dan Keunggulan Kompetitif Sektor Industri Manufaktur di Jawa Tengah Sebelum dan Selama Krisis”. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 1(1), 2004, pp. 1-16.
- Benner, M. J. and Tushman, Mieske. “Exploitation, Exploration, and Process Management: The Inward and Outward Looking”. *Academy of Management Review*, 28(2), 2006, pp.238-256.
- Basyir, A. “Perumusan Strategi bagi Klaster Industri Komponen Otomotif Menggunakan Pendekatan Strategic Management untuk Meningkatkan Daya Saing”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Gadjah Mada*, (5)1, 2009, hal. 214-226.
- Crals, E. and Vereeck, L. “What is National Competitiveness?”. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 12 (2), 2005, pp 173-184.
- Dwi, Haryanto dan A, Ardiyanto. “Krisis Moneter 1998 dan Kesempatan Re-Industrialisasi Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UGM Yogyakarta*, 4(2), 2006, hal. 524-555.
- G. D., Karagiannopoulos, Georgopoulos N., and Nikolopoulos. “Fathoming Porter’s Five Forces Model in The Internet Era”. *The Journal of Policy, Regulation, and Strategy for Telecommunications*, 7(1), 2005, pp. 354-386.
- Hamman and Elisabeth, Kross. “Conflict Resolution in Distribution Channel: A Case Study on High Involvement and Low Involvement Products”. *Journal on Distribution*, (11)9, 2007, pp. 45-60.
- Hanoum, S. and Partiw, S. G. “Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur dengan Pendekatan Klaster Industri dan Manajemen Strategis”. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran*, 8(3), 2009, hal. 52-67.
- Hargo, P. “Analisis Daya Saing Negara ASEAN terhadap Sektor Padat Karya”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UGM*, 3(2), 2008, hal. 33-55.
- Irianto, S. “Manajemen Sektor Otomotif dalam Kaitannya dengan Konsep Rantai Pasokan Terpusat”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Gadjah Mada*, Vol (5), 2012, hal. 180-197.
- Iryani, U. “Masa Depan Sektor Manufaktur di Indonesia di Antara Peningkatan Nilai Tambah dan Peningkatan Ekspor”. *Jurnal Kajian Bappenas*, 5(1), 2011, hal. 17-45.
- Juliana K., M, Davis M, and H, Ullly. “Dimension in Manufacturing: Practices in India and Bangladesh”. *Journal of Urban Studies*, 22(1), 2009, pp. 413-444.
- Narver, J. C. and Slater, S. F. “The Effect of Market Orientation on Industrial Policy”. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 17(1), 2007, pp. 44-52.

Robert, K. and Hubbert, Ivan. "International Entropy: A Trade off Between Supplier and Principal Ownership". *Journal of International Trade*, Vol. III, 2007, pp. 45-60.

Slater, F Simone. "Industrial Policy in Emerging Market: Study towards Unexpected Growth in Jamaica". *Journal of the Academy of Marketing Science*, 17 (3), 2007, pp. 211-226.

Sureephong, P. "Industrialization and Cluster Development". *Harvard Business Review*, 14(4), 2006, pp. 45-68.

#### **Dokumen Resmi**

Badan Pusat Statistik. *Pertumbuhan Industri Otomotif Nasional 1990-2011*. Jakarta: BPS, 2013.

World Bank. *Manufacturing Survey Reports*, 2009.

World Bank. *Mempercepat Laju Pertumbuhan di Sektor Manufaktur Indonesia*. Country Report No. 73128., World Bank, 2012.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**